

RINGKASAN DISERTASI

**KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA PERIODE 1973-1983:
Sebuah Sumbangan Pemahaman
Tentang Proses Legalisasi Konstitusional
dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia**



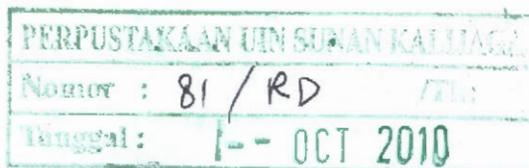
Oleh:

Mohammad Damami
NIM: 90140/S-3

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2010



TIM PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
Sekretaris	: Dr. H. Sukamta, M.A.
Promotor/Penguji	: Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja
Promotor/Penguji	: Dr. H. Abdurrahman
Anggota Penguji	: Prof. Dr. H. Koento Wibisono
Anggota Penguji	: Prof. Dr. H. Djoko Suryo
Anggota Penguji	: Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul
Anggota Penguji	: Prof. Dr. H. Djam'annuri

ABSTRAK

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) 1973 dan SU-MPR 1978 telah mengesahkan nama dan lembaga "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Namun, proses-proses legalisasi konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan implementasi hasil legalisasi konstitusional tersebut masih menyisakan ketegangan-ketegangan.

Masalah yang akan dicari jawabannya adalah: (1) mengapa atau apa yang menjadi akar penyebab ketegangan-ketegangan itu terjadi?; dan (2) bagaimana implikasi terhadap kebijakan eksekutif dan penerimaan publik terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks pluralitas keberagaman di Indonesia?

Pencarian jawaban terhadap masalah-masalah di atas lewat penelitian perpustakaan (*library research*) dengan format: *Pertama*, dilakukan penelitian secara global tentang aspek internal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penelitian secara khusus tentang proses dan implikasi legalitas konstitusionalnya. *Kedua*, pendekatan sejarah dan dibantu teori-teori yang relevan yang dipakai untuk memetakan peristiwa legalisasi konstitusional yang terjadi. *Ketiga*, teknik analisisnya memakai teknik interpretasi berdasar kaidah teks dan konteks di sekitar data tentang masalah yang bersifat politis, yuridis, dan normatif teologis.

Temuan deskriptif yang diperoleh: *Pertama*, eksistensi fungsional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terimbas paralel oleh pasang surut pemikiran keagamaan dan perjuangan ideologis para elite nasionalis Islami dalam forum-forum legislatif yang demokratis yang dijamin secara legal konstitusional. *Kedua*, eksistensi fungsional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dipengaruhi oleh berhasil dan tidaknya kalangan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan Kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu nama dan format sosok yang dapat diterima oleh seluruh wadah sosial yang ada. Di samping itu, dipengaruhi pula oleh berhasil atau tidaknya kalangan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menghindari permainan politik dengan berdekatan pusat kekuasaan, apalagi kalau di tengah-tengah pergumulan ideologi.

Temuan yang bersifat kontributif yang diperoleh: *Pertama*, kerukunan hidup beragama dan ber-Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berprasyarat “keterbukaan” yang didukung oleh sosialisasi studi agama-agama sebagai pilar ilmiah dan pendekatannya. *Kedua*, pemecahan masalah internal diserahkan kepada agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bersangkutan, negara hanya menjamin dan melayani. Salah satu bentuk jaminan adalah penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM.

RINGKASAN DISERTASI

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA PERIODE 1973-1983:

Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) 1973 telah mengesahkan nama "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" secara legal konstitusional dalam salah satu isi ketetapannya. Sungguhpun begitu, penerimaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses penyelenggaraan negara, baik dalam wilayah eksekutif maupun publik, masih menimbulkan ketegangan-ketegangan. Hal ini menarik untuk diteliti, apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya.

Ada asumsi bahwa kemungkinan penyebab intinya ada 2 (dua). *Pertama*, imbas perjuangan legal konstitusional para elite nasionalis Islami untuk menyukseskan Islam dapat ikut mewarnai negara. Perjuangan ini antara lain mungkin dipengaruhi oleh mulai meningginya kesadaran kebangkitan Islam di kalangan elite nasionalis Islami yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan sekuler dan pengetahuan agama Islam sekaligus. Meningginya sensitivitas perjuangan ideologis dalam arus perjuangan legal konstitusional ini diasumsikan menjadi salah satu sebab inti ketegangan tersebut terus terjadi. *Kedua*, imbas belum adanya kebakuan format dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri dan ditambah lagi belum adanya kestabilan hubungan antar-wadah sosial serta organisasi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal tersebut mudah memberi peluang terjadinya ketegangan internal

di kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya realitas ketegangan dan adanya asumsi-asumsi penyebab seperti itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor apa sebenarnya yang menjadi akar penyebab dan apa implikasi-implikasi yang mungkin diakibatkannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alur latar belakang masalah di atas, ada 2 (dua) masalah yang akan dicari jawabannya, yaitu :

- a. Mengapa proses legalisasi konstitusional tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978 senantiasa diliputi ketegangan, baik di wilayah legislatif maupun dalam forum publik? Artinya, apa yang menjadi akar penyebab terjadinya ketegangan sebelum, di tengah-tengah, dan setelah SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978 berkaitan dengan legalisasi konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa?
- b. Bagaimana implikasi legalitas konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap kebijakan pihak eksekutif dan penerimaan publik dalam konteks pluralitas keberagaman di Indonesia?

3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menelusuri seluk beluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dari sisi internalnya, kiprah eksternalnya yang diduga menyebabkan ketegangan-ketegangan sebelum, di tengah-tengah, dan sesudah proses-proses legalisasi konstitusional terjadi, serta implikasi penanganan untuk pembinaannya berikut implikasi kelanjutannya dalam konteks pluralitas keberagaman di Indonesia.

Kegunaan penelitian disertasi adalah memberikan kejelasan latar belakang timbulnya ketegangan dan implikasi lanjutannya. Dengan

demikian sikap atau pembinaan apapun terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan lebih proporsional, terutama dalam pemahaman terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi kelompok agama dan sebaliknya, dalam bingkai kerukunan hidup beragama berdasarkan kesadaran pluralitas keberagamaan di Indonesia.

4. Kerangka Teori

Untuk menuntun pemahaman dalam proses pembahasan disertasi ini, penulis memakai beberapa format teori yang penulis anggap relevan atau berdekatan. *Pertama*, teori tentang kelompok elite. Bahwa masyarakat Timur, juga masyarakat Indonesia, menjelang runtuhnya penjajahan bangsa Barat di Timur, mengalami proses pembaratan (*westernization*), antara lain lewat pendidikan. Kelompok masyarakat yang cepat menempuh jalan pembaratan, menjadi kelompok elite yang akhirnya juga berimbas kepada masyarakat yang berada di luar orbit pembaratan. Kelompok elite memiliki ciri: (a) terpanggil sebagai “pengubah manusia (*human transformer*)”; (b) berpikir cepat; (c) peka berebut kedudukan; dan (d) berjuang dengan piranti pengetahuan dari Barat. Karena ciri-cirinya seperti itu, kelompok elite ini kecenderungannya berjuang di wilayah atas (lembaga-lembaga yang dianggap menentukan). Kelompok elite ini muncul dari kalangan mahasiswa atau kaum terpelajar yang bernetamorfosis menjadi apa yang disebut kaum *priyayi*, walaupun tidak seluruhnya perlu disebut dengan sebutan semacam itu.

Kedua, teori tentang nasionalis sekuler dan nasionalis Islami. Bahwa kedua kelompok ini sama-sama nasionalisnya, yaitu sama-sama ingin meraih, mempertahankan, dan melestarikan (juga mengisi) kemerdekaan Republik Indonesia. Keduanya hanya berbeda dalam orientasi ideologi dalam berkehidupan bernegara, namun keduanya adalah kelompok elite di Indonesia. Kelompok elite nasionalis sekuler

umumnya berlatar belakang pendidikan Barat, sedangkan kelompok elite nasionalisasi Islami kebanyakan berlatar belakang pendidikan pesantren atau dengan diperkuat oleh otodidak. Sekalipun tidak seluruhnya, kelompok elite nasionalis sekuler ini dalam konteks awal abad ke-20 dan awal kemerdekaan, dikenal dengan sebutan kelompok *abangan*. Kelompok ini kebanyakan dari kalangan *priyayi*. Sementara itu, kelompok elite nasionalis Islami, sekali lagi kalau dikontekskan dengan kondisi awal abad ke-20 dan awal kemerdekaan, dikenal dengan sebutan kaum *santri*, yang kemudian nanti bermetamorfosis menjadi kaum *cendekiawan muslim*. Perjuangan ideologis dalam berkehidupan bernegara di Indonesia pada hakikatnya diwarnai oleh pertarungan ideologis antara elite nasionalis sekuler dan elite nasionalis Islami ini.

Ketiga, teori tentang identitas. Kesadaran identitas dibangun oleh pengalaman individu atau kelompok dalam proses sejarah kehidupannya. Kesadaran identitas merupakan hasil pengendapan perasaan kolektif masyarakat. Di dalamnya terdapat proses penyapaan secara terus-menerus antara ungkapan “aku” (bersifat psikologis) dan ungkapan “kita” (bersifat sosiologis) secara korelatif. Dalam kaitannya dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kesadaran identitas budaya dapat dipakai sebagai salah satu piranti analisis, apalagi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanannya diklaim sebagai “budaya spiritual” yang dianggap para pendukungnya sebagai sesuatu yang khas. Kekhasannya didukung oleh tradisi berpikir sinkretik dan kuatnya tradisi kebahasaan, dalam hal ini bahasa Jawa terutama.

Keempat, teori tentang mistik. Mistik adalah penghayatan spiritual yang intim dan penuh keharuan akan adanya realitas absolut yang penuh rahasia (*mystical union*). Dalam tradisi agama Semit dan Timur, unsur mistik ini merupakan salah satu unsur pokok. Di dalam mistik penganut dan penghayat agama merasakan pengalaman batin yang bersifat spiritual. Menurut Niels Mulder, mistisisme merupakan ideologi khas Indonesia. Dalam tradisi mistik di Jawa, umpamanya, diskusi makna

simbolik dari kisah *Mahabharata*, yang kemudian disosialisasikan secara populer lewat pertunjukan pagelaran *wayang*, terutama dalam *lakon* Dewa Ruci, sangat khas pemahaman dan penghayatannya. *Lakon* tersebut berkulminasi pada ajaran Brahmanisme yang dalam konsep Jawa telah bermetamorfosis dengan istilah *manunggal ing kawula-Gusti*. Sementara itu, agama Islam menganggap mistik merupakan salah satu unsur saja dari sekian banyak unsur inti yang lain dan ajaran yang paling populer adalah *transendensi* Tuhan; bahwa Tuhan dalam posisi mengatasi segala realitas yang ada (Tuhan hanya dapat “didekati” saja dan “tidak dapat bersatu” dengan-Nya). Pergulatan paham antara *imanensi* Tuhan (“*manunggaling kawula Gusti*”) dan *transendensi* Tuhan (Tuhan hanya dapat “didekati” saja) ini dapat untuk memahami secara lebih mudah terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kelima, teori tentang ideologi politik. Pada hakikatnya, ideologi adalah muatan berpikir tentang hal yang lain dan tentang orang lain selain dirinya. Ideologi politik di sini dimaksudkan adalah ideologi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ideologi politik yang menjadi endapan pemikiran politik umat Islam Indonesia, menurut analisis George McTurnan Kahin, memiliki 3 (tiga) faktor penunjang, yaitu faktor anti penjajah, faktor kesadaran berjamaah untuk mengkonsolidasi kekuatan, dan faktor bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Kesadaran ideologi politik Islam memiliki 3 (tiga) faktor modal, yaitu faktor keberhasilan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam, faktor doktrin normatif (sekalipun bukan doktrin yang telah sistematis, komprehensif, dan operasional) dalam kitab suci al-Qur’an, dan faktor kesadaran kebangkitan Islam yang berasal dari Timur Tengah (Kairo dan Mekkah).

Keenam, teori hubungan agama dan negara. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, pandangan tentang hubungan agama dan negara ada 3 (tiga). *Yang pertama*, agama dan negara merupakan kesatuan yang tak terpisahkan (*integrated*). Ini pandangan yang ekstrem bernuansa

teokratis. *Yang kedua*, agama dan negara saling terkait dan berhubungan (simbiosis). Ini pandangan yang relatif moderat. Ada bagian-bagian tertentu dari ajaran agama (Islam) yang dilindungi dan dibantu negara serta sebaliknya negara mendapat dukungan apresiatif dari pemeluk agama. *Yang ketiga*, agama dan negara terpisah secara ekstrem (sekularistik). Agama dianggap sebagai kepentingan privat, sedangkan negara adalah kepentingan publik. Pandangan yang kedua tampaknya yang mendapat apresiasi di Indonesia. Tentang "negara", ada 3 (tiga) pemikiran umat Islam. *Pemikiran yang pertama*, berdasarkan konsep *khilafah* yang diikuti oleh Rasyid Ridla, Sayyid Quthub, dan Abu A'la al-Maududi. Konsep ini dialaskan contoh pada masa hidup Rasulullah s.a.w., Khulafa ar-Rasyidin, dan Daulah Utsmaniyah di Turki. *Pemikiran yang kedua*, berdasarkan konsep *imamah* yang diikuti di kalangan Syi'ah. Bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan yang dikaitkan dengan masalah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. *Pemikiran yang ketiga*, berdasarkan konsep *imarah* atau konsep pemerintahan yang di Indonesia diikuti oleh M. Natsir. Dalam konsep ini, negara dipandang hanya sebagai alat saja untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama (Islam) ke dalam situasi konkret. Di situ masih ada kemungkinan-kemungkinan inovasi konsep secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan tuntutan zamannya.

Secara sendiri-sendiri, gabungan atau percampuran dari keenam teori di atas itulah yang dipakai untuk mempertajam analisis dalam disertasi ini.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian disertasi ini, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang sebagai lembaga dalam situasi konkret. Sungguhpun begitu, apa yang disebut "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dipandang sebagai sebuah keutuhan lembaga dan bersifat global. Karena Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dikatakan sebagai sebuah budaya spiritual, maka penelitian ini, dari sudut sejarah, dapat disebut penelitian sejarah agama.

Pendekatan kesejarahan (historis) yang dipakai di sini. Menurut Kuntowijoyo, dalam konteks sejarah agama, jika diberlakukan pendekatan kesejarahan, maka diperlukan beberapa syarat, yaitu harus berdasar fakta, bersifat diakronis, ideografis, unik, dan berlangsung secara empiris. Berdasar *fakta* artinya harus benar-benar terjadi. Bersifat *diakronis* artinya deskripsi peristiwanya dalam rentang waktu yang di dalamnya terjadi perubahan (*change*) dan kesinambungan (*continuity*). *Idiografis* artinya penggambaran secara detail dan selengkap mungkin, namun tidak untuk menemukan hukum-hukum umum. *Unik* artinya ada kekhasan yang terbatas dalam ruang dan waktu. Berlangsung *empiris* artinya bahwa peristiwa yang digambarkan adalah berdasar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh dialami manusia secara objektif.

Pendekatan kesejarahan difokuskan pada kesejarahan politik. Data yang dikumpulkan berdasar 5 (lima) prinsip penjabaran. *Pertama*, data di seputar pemikiran politik, yaitu masalah hubungan agama dan negara, misalnya data polemik pemikiran politik sebelum kemerdekaan sampai dengan sebelum tahun 1973. *Kedua*, tingkah laku perpolitikan meliputi pada masa prakemerdekaan dan pascakemerdekaan sampai tahun 1983. *Ketiga*, muatan perdebatan tentang agama sebagai dasar negara yang dikaitkan dengan posisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam forum legislatif. *Keempat*, arah penanganan birokratif eksekutif sebagai konsekuensi operasional terhadap keputusan legislasi. *Kelima*, muatan internal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibaca secara kelembagaan.

Teknik analisisnya meliputi teknik interpretasi berdasar kaedah teks dan konteks. Teks dalam arti peristiwa otentiknya dan konteks dalam arti keterkaitan peristiwa itu dengan kondisi yang melingkunginya. Teknik intepretasi ini dijabarkan prakteknya lewat 3 (tiga) cara, yaitu,

pertama, pemahaman terhadap data tertulis, entah berupa data peristiwa, tokoh, pemikiran, dan aksi. *Kedua*, menghubungkan antardata mulai dari taraf pemikiran sehat (*common sense*), asumsi, dan penalaran hipotesis yang dapat mengantarkan kepada kesimpulan logis argumentatif. *Ketiga*, menarik makna yang terkait dengan roh zamannya (*zeitgeist*), baik berupa makna keterkaitan, makna keunsuran, makna keterpengaruh, atau makna kausalitas. Semua itu dinarasikan.

Dalam hal-hal tertentu, kalau dianggap relevan, dipakai juga analisis perbandingan.

B. PEMBAHASAN POKOK

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Aspek Internal: Format Substansi dan Institusi

a. Pengertian dan sejarah.

Nama yang populer sebelum disebut “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah “Kepercayaan” saja. Penamaan terhadap Kepercayaan ini terus menerus mengalami pergeseran, sesuai dengan kondisi dan zaman yang melingkunginya. Mula-mula sebutan “Kepercayaan” dan “kebatinan” pada masa prakemerdekaan bersilih-ganti penggunaannya. Pada zaman revolusi kemerdekaan terimbas dengan sebutan “klenik” dan pascakemerdekaan sampai tahun 1970-an sebutan “kebatinan” yang meninggi. Kemudian menjelang Sidang Umum MPR 1973 sebutan “kepercayaan” meninggi kembali. Akhirnya ditetapkan namanya menjadi “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan budaya spiritual yang ada di Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini pengertiannya adalah: pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

b. Sosok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari aspek struktur, jika dilihat dari kacamata kelembagaan, maka Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kemiripan dengan struktur agama pada umumnya, yaitu memiliki unsur-unsur *theoretical expression* yang berupa ajaran, *practical expression* yang berwujud pemujaan, dan *sociological expression* yang menampak dalam wujud kumpulan penganut.

Ajaran dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meminjam hasil sistematisasi dari Rachmat Subagya, meliputi kebatinan, kerohanian, dan kejiwaan. Dalam unsur *kebatinan* termuat ajaran penggunaan daya jiwa dan daya konsentrasi untuk menyingkap rahasia kegaiban di luar fenomena alam. Sementara itu dalam unsur *kerohanian* termuat ajaran pencapaian kontak langsung antara roh manusia dengan Roh Yang Mutlak (Tuhan). Sedangkan dalam unsur *kejiwaan* termuat ajaran tentang jiwa yang sehat dan hidup yang benar.

Unsur *kerohanian* dan unsur *kebatinan* dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas dapat diperbandingkan secara ontologis dengan unsur dari struktur *tasawuf* dalam Islam yang berunsurkan: konsep tentang Tuhan, manusia, dan hubungan antara keduanya; jalan mistik dalam tasawuf; pengalaman mistik dalam tasawuf; dan perbuatan luar biasa sebagai buah sampingannya. Karena itu, terdapat kesan kuat bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut sebenarnya tidak lebih daripada apa yang disebut gerakan mistik.

Pemujaan dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa populer disebut "*laku*" yang dalam tasawuf disebut "*suluk*". *Laku* tersebut meliputi *distansi* (mengambil jarak dengan kesadaran terhadap dunia sekitar), *konsentrasi* (melakukan teknik-teknik askesis

untuk mencapai pengalaman rohani yang tinggi), dan *representasi* (peningkatan kepekaan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umat manusia).

Kumpulan penganut menampak dalam kelompok-kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diikat dalam wadah sosial atau tidak. Mereka dibimbing oleh *guru laku* yang patut diikuti dalam olah rasa. Mereka ini dari segi *sifatnya* dibedakan antara penghayat perorangan (dalam arti tidak masuk wadah sosial tertentu dan berusaha memperdalam kerohaniannya secara pribadi), kelompok perorangan (dalam arti ingin menambah pengetahuan rohaninya lewat bergaul dengan penghayat lain namun tetap tidak masuk ke dalam wadah sosial tertentu), dan kelompok paguyuban (dalam arti penghayat yang masuk ke dalam wadah sosial tertentu). Dari segi *faktualnya* dapat dibedakan antara penghayat murni, penghayat kejawen (campuran antara budaya spiritual sendiri dan terbuka menerima ajaran agama lain), dan penghayat keagamaan (dasar penghayatannya adalah ajaran agama yang diyakini tetapi cara menguraikan memakai bahasa setempat).

Perbedaan mendasar antara agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terletak pada konsep "keselamatan". Bahwa letak kekuatan agama besar dunia adalah adanya ciri adaptif terhadap tantangan kemajuan berpikir manusia, penganutnya terpenggil untuk menyebarkan agama yang dipeluk, ajarannya memberikan kepuasan spiritual dan sosial, dan memiliki sifat terbuka untuk dikritik dan ditafsiri dalam segala zaman. Dalam agama besar dunia juga dijelaskan ajaran tentang teologi, eskatologi, dan "keselamatan" (*salvation*).

Teologi transenden-monoteisme berkait dengan eskatologi dua alam terpisah (alam dunia dan alam akhirat), teologi imanen-panteisme-monisme berkait dengan eskatologi dua alam menyatu (kelahiran kembali atau *rebirth*), dan teologi realisme/dualisme

berkaitan dengan eskatologi keabadian dua kekuatan (pertarungan kekuatan kebaikan melawan kekuatan kejahatan). Lebih jauh daripada hal tersebut, dalam agama besar dunia juga dijelaskan secara rinci tentang konsep “keselamatan” yang ditawarkannya. Solidnya rasa *in-group* di tengah penganut agama berasal dari sini.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang sama memiliki konsep teologi (terutama teologi imanen-panteisme-monisme) dan eskatologi (yang unik adalah cenderung bereskatologi dua alam terpisah) sebagaimana agama besar dunia. Namun, mereka tidak memiliki konsep tentang “keselamatan (*salvation*)” yang spesifik, eksplisit, dan distingtif. Sesungguhnya begitu mereka tetap menuntut hak yang sama dengan kalangan agama. Doktrin “keselamatan” inilah yang membedakan tajam antara keduanya.

Selanjutnya, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki epistemologi sendiri untuk mencapai kebenaran yang dihayatinya. Menurut kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuatu baru dianggap sebagai “kebenaran” apabila di dalamnya termuat pengetahuan lahir (lahiriah) dan sekaligus bersifat batin (batiniyah). Karena itu ukuran yang dipakai untuk menyaring agar tercapai kebenaran yang dimaksud adalah: kebenaran tersebut untuk menuju kesempurnaan dan kebenaran tersebut untuk menuju *manunggaling urip* (menjaga keselarasan dan kepantasan). Yang terakhir, untuk mencapai kebenaran adalah dengan cara olah rasa dan olah pikir (yaitu dengan olah penafsiran permainan bahasa dan olah penafsiran pertunjukan wayang).

Sementara itu untuk mengikat penghayat yang sepaham, maka diadakanlah wadah sosial yang sampai saat disertasi ini ditulis tidak kurang dari 247 buah banyaknya, dengan identitas nama yang berbeda-beda.

c. Organisasi

Yang dimaksud dengan istilah “organisasi” di sini adalah

badan yang mengurus penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menghubungkan antara kepentingan internal (konsolidasi) dan kepentingan eksternal (pelestarian dan pemberdayaan eksistensi di tengah pergaulan antar organisasi).

Sejak tahun 1955 sampai saat ini ada beberapa organisasi yang didirikan, yaitu Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang didirikan pada tanggal 21 Agustus 1955, Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian Kebatinan Kejiwaan (BK5I) yang berdiri tanggal 25 Juli 1966, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) yang berdiri tahun 1970, Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BPK) yang didirikan pada tahun 1979, Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (FKPK) dan Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK) yang keduanya didirikan pada tahun 1999. Latar belakang pendirian berbagai organisasi tersebut diwarnai oleh perkembangan keadaan yang melingkungi, namun tidak lepas pula dari friksi internal yang dipicu oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Berbagai organisasi tersebut ternyata belum menjamin kesolidan internal mereka.

2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Aspek Eksternal: Pergumulan Penentuan Posisi dalam Konteks Legalisasi Konstitusional dalam SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978

a. Prakondisi sampai menjelang SU-MPR 1973.

Sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) 1973 merupakan momentum legislasi konstitusional yang banyak dinanti-nantikan kedatangannya, apalagi MPR 1973 adalah hasil Pemilihan Umum I pada zaman pemerintahan Orde Baru yang ingin menjamin berlangsungnya demokrasi Pancasila. Kalangan elite

nasionalis Islami berharap mampu memperjuangkan ideologi Islamnya ke dalam sidang-sidang SU-MPR 1973 tersebut. Sebab, dari kalangan agama saja yang paling menonjol dan getol memperjuangkan ideologinya. Sementara itu, kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merasa belum terjamin eksistensinya berdasar legislasi konstitusional yang lebih dapat diterima secara umum dan fungsional. Karena itu momentum SU-MPR 1973 juga menjadi tumpuan harapannya.

Kalangan elite nasionalis Islami, pendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kalangan elite nasionalis sekuler, tampaknya telah melakukan pemanasan atau telah menciptakan prakondisi menjelang SU-MPR 1973 untuk melicinkan keberhasilan perjuangannya. Dalam masa prakondisi ini muncul 2 (dua) macam polemik, yaitu *polemik tentang kebatinan* pada tahun 1960-an dan 1970-an serta *polemik tentang ideologisasi Islam* pada tahun 1940-an. Polemik tentang kebatinan antara Warsito S. (pendukung kebatinan) dan H.M. Rasjidi dan H. Hasbullah Bakry (elite nasionalis Islami) berisi 2 (dua) tema, yaitu tema latar sejarah keraton Jawa dan tema hakikat kebatinan. Selanjutnya polemik kebatinan antara M.W. Djodjodigoeno dan H. Hasbullah Bakry serta Widji Saksono mengambil tema pengertian "agama" dan "kebatinan". Dalam polemik tersebut antara lain dinyatakan bahwa menurut Warsito S. kerajaan Mataram Sultan Agung adalah penerus tradisi Mataram Kuno, bukan penerus kerajaan Islam Demak dan Pajang. Sementara itu H.M. Rasjidi menyatakan bahwa kerajaan Mataram Sultan Agung adalah penerus tradisi Demak dan Pajang. Selanjutnya, menurut Warsito S., kebatinan adalah paham Hindu-Buddha yang dijawanisasikan, bukan dari reformasi terhadap Islam yang masuk dan bukan warisan wejangan Wali Songo. Menurut H.M. Rasjidi, kebatinan adalah yoga Tantrisme Hindu-Buddha yang dihubungkan dengan ajaran Islam tetapi secara kurang tepat.

Selanjutnya polemik tentang ideologisasi Islam antara Ir. Sukarno (elite nasionalis sekuler) dan M. Natsir (elite nasionalis Islami). Tegasnya, polemik tersebut berisi polemik tentang hubungan agama dan negara. Menurut Ir. Sukarno, dengan melihat kasus di Turki waktu itu, agama dianggap penghambat kemajuan negara, karena agama (Islam) telah kehilangan spiritnya (kesejatiannya), agama telah menjadi *jumud* (beku). M. Natsir membantahnya dengan argumentasi, bahwa agama (Islam) masih bisa diobati penyakitnya, dikembalikan spiritnya (kesejatiannya), asal ada kemauan baik dari pihak penguasa. Bagi M. Natsir negara adalah sekedar alat, sedangkan bagi Ir. Sukarno negara adalah tujuan. M. Natsir (elite nasionalis Islami) berangkat dari cara berpikir *normatif-teologis*, Ir. Sukarno (elite nasionalis sekuler) berangkat dari cara berpikir *sejarah/historis-politis*.

Selanjutnya masalah Piagam Jakarta yang di dalamnya ada ungkapan “ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang semula sempat dicoret dan diganti dengan anak kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimasalahkan kembali dalam Badan Konstituante yang pada akhirnya persoalan krusial tersebut dipecahkan dengan suatu rumusan yang dimasukkan ke dalam *konsideran* Dekrit Prosiden RI tanggal 5 Juli 1959 sebagai berikut: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 *menjiwai Undang-undang Dasar 1945* [kursif dari penyalin] dan adalah *merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut* [kursif dari penyalin]”. Rumusan kunci dua anak kalimat, yaitu “menjiwai Undang-undang Dasar 1945” dan “merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”, bagi pejuang legislasi konstitusional dari kalangan elite nasionalis Islami, merupakan senjata dan argumentasi konstitusional untuk masa-masa berikutnya.

Jadi, dalam masa prakondisi menjelang SU-MPR 1973, paling tidak ada 3 (tiga) masalah hangat yang terjadi, yaitu, *pertama*, polemik tentang kebatinan; *kedua*, polemik tentang ideologisasi Islam yang mengerucut tentang hubungan agama dan negara; dan *ketiga*, Piagam Jakarta yang akhirnya masuk ke dalam *konsideran* konstitusional dalam Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, yang di dalamnya ada pernyataan pemberlakuan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

b. Posisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Islam sampai Tahun 1983.

Setelah Ir. Sukarno selaku Presiden RI berpisah dengan Drs. Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden RI sejak 1 Desember 1956 (karena Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri selaku Wakil Presiden), maka Ir. Sukarno memerintah dengan kekuasaan di satu tangan, maka arah politik nasional adalah menurut ide dan pemikiran Ir. Sukarno pribadi, seperti Manifesto Politik, USDEK, Front Nasional, dan Nasakom. Akibatnya dasar negara, yaitu Pancasila, yang salah satu silanya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", pelan-pelan redup (mati suri) dikalahkan oleh ambisi politik praktis dari Ir. Sukarno. Bahkan ketika Ir. Sukarno menggagas konsep "Nasakom" (Nasional, Agama, Komunis), Pancasila dijadikan tumpuan tafsiran justifikasi. Dalam kondisi seperti ini, kalangan elite nasionalis Islami tetap lantang mempertahankan ideologi keislamannya sebagaimana tercermin dalam Piagam Jakarta, yang lebih khusus pada rumusan sila pertama dalam Pancasila. Dalam suasana mundur dan pudarnya pamor Pancasila seperti itu, tidak jelas di mana posisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menempatkan diri. Kontak silaturahmi antara kalangan elite nasionalis Islami dan para pendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (yang kebanyakan adalah kalangan elite nasionalis sekuler) tidak pernah terjadi.

Ketika G.30.S/PKI gagal mencapai tujuannya dan pemerintahan beralih ke tangan Orde Baru yang ingin menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara secara konsekuen, untuk kesekian kalinya umat Islam dipojokkan kembali dengan dalih sebagai umat ideologis. Orde Baru mengangkat slogan "program, *yes*, ideologi, *no*" dan umat Islam terkena getah di sini. Dalam posisi umat Islam terjepit seperti ini, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama-sama memiliki konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa", ternyata tidak membantu apapun, atau paling tidak mau menjembatani antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru, tidak dilakukan sama sekali. Bahkan ketika ada wacana membenturkan Islam dengan Pancasila, kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak berbuat apapun terhadap umat Islam, sekalipun, sekali lagi, sama-sama sebagai kelompok yang dibingkai oleh sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan malahan kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ikut menempel terus dengan pusat kekuasaan pemerintahan yang dikuasai oleh Golongaa Karya (Golkar) dan militer. Silaturahmi antara umat Islam dan kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa justru makin jauh dan hampir dapat disebut lenyap. Benih-benih peristiwa faktual seperti inilah yang antara lain menjadi pemicu ketegangan di kemudian hari.

- c. Garis besar proses Legalisasi konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978.

Ketika kekuasaan Presiden Sukarno runtuh (penyerahan resmi kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Jendral Soeharto pada tanggal 22 Februari 1967), ekonomi dalam negeri dan orientasi politik luar negeri dibenahi kembali. Sungguhpun pemutaran jarum kebijakan pemerintahan tersebut dinilai positif,

namun dalam hal kecurigaan ideologis masih disisakan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan alamatnya ditujukan kepada umat Islam.

Ketika posisi umat Islam dalam keadaan dicurigai pemerintahan Orde Baru di atas, tampaknya justru Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (yang banyak didukung oleh kalangan elite nasionalis sekuler) makin intensif membenahi diri dan makin mengambil jalan politik praktis dengan cara menempel terus di lingkaran pusat kekuasaan. Secara kebetulan pemerintahan Orde Baru pun masih semangat-semangatnya mencari dukungan yang antara lain dari kelompok *abangan*. Seperti diketahui, dari kelompok inilah kebanyakan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berasal, sekalipun tidak seluruhnya. Dengan demikian hubungan mesra antara pemerintahan Orde Baru (yang intinya di tangan Golkar dan militer serta tangan kanannya adalah kalangan profesional-teknokrat) dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa boleh dikatakan sebagai hubungan *symbiosis mutualis*. Mengerucutnya hubungan mesra tersebut berpuncak pada saat setelah diadakan Symposium Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) di Yogyakarta pada tanggal 7-9 Nopember 1970, yang salah diktum keputusannya menyejajarkan kedudukan dan fungsi kepercayaan dengan "agama" yang termuat secara eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pemilihan Umum 1971, Golkar meraih kemenangan secara signifikan, yaitu 62,8% suara. Kondisi kemenangan ini jelas merupakan harapan besar kalangan pendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk sukses mencapai pengesahan secara legal konstitusional seperti yang diharapkan dalam diktum keputusan seperti tersebut di atas.

Selanjutnya, dalam proses-proses persidangan yang menegangkan, *nama* dan *lembaga* Kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa berhasil disahkan sebagai salah satu bagian ketetapan dari SU-MPR 1973.

Sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum 1977 untuk memilih anggota MPR 1978, terjadi suasana yang sangat panas berhubung adanya usaha-usaha represi (walaupun terlihat lunak) untuk menelikung agar wakil-wakil umat Islam yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak membesar. Misalnya mulai dari pemanfaatan isu "Komando Jihad", mempermasalahkan gambar Ka'bah untuk Partai Persatuan Pembangunan, merekruting tokoh atau kyai tertentu, dan sebagainya. Panasnya suasana seperti ini tampaknya terbawa-bawa ke ruang-ruang sidang dalam SU-MPR 1978. Dalam perdebatan-perdebatan SU-MPR 1978 tersebut bagi kalangan elite nasionalis sekuler yang mendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berpangkal pada cara berpikir *politis yuridis*, sedangkan dari kalangan elite nasionalis Islami yang menolak Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berpangkal pada cara berpikir *normatif teologis*. Karena itu tidak mudah dicapai kompromi-kompromi. Pada akhirnya keputusan akhir dari SU-MPR 1978 yang berhasil disahkan ada diktum yang menyebutkan:

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *tidak merupakan agama* [kursif dari penyalin]. *Pembinaan* [kursif dari penyalin] terhadap Kepercayaan kepada [sic, pen.] Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:

- Agar *tidak mengarah pada pembentukan agama baru* [kursif dari penyalin].
- Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Implikasi Legalitas Konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap Arah Proses Pembinaannya

a. Implikasi terhadap pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan Departemen Agama Republik Indonesia

Departemen Agama didirikan tidak lepas dari sejarah yang melatarbelakanginya, yaitu untuk faktor *penjaminan* (wacana yang dikembangkan Syumubu pada zaman Jepang) dan faktor *pengawasan* (wacana yang dikembangkan *Het Kantoor voor Inlandsche zaken* pada zaman Belanda). Dalam konteks pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada periode kepemimpinan Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A. pada tahun 1973-1978, dan apalagi periode-periode sebelumnya, tampaknya faktor *pengawasan* yang lebih menonjol. Namun setelah adanya keputusan dalam SU-MPR 1978, yaitu pada masa kepemimpinan Letnan Jendral H. Alamsjah Ratu Perwiranegara pada tahun 1978-1983, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilepas dari tanggung jawab dan tugas di Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan demikian faktor pengawasan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hilang karenanya. Sungguhpun begitu pesan dan keputusan yang berkata kunci "pembinaan" yang tercantum dalam keputusan SU-MPR 1978 tetap harus ada dan inilah yang kemudian ditangani oleh departemen lain.

b. Sekilas tentang pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Setelah tugas pembinaan dilepaskan oleh Departemen Agama RI, tugas pembinaan tersebut beralih ke tangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan adalah Dr. Daoed Joesoef. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perlakuan pembinaan yang kemudian dialihkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI ini antara lain didasarkan alasan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masuk kategori "budaya spiritual" yang layak mendapat penjaminan seperlunya.

Tatkala di bawah pembinaan (dalam arti *penjaminan*) di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini ada tuntutan-tuntutan dari pihak Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang seolah-olah ingin disamakan persis dengan "agama", yaitu menuntut tata cara pernikahan sendiri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri, pemakaman dan tata cara kematian sendiri, dan sumpah/janji jabatan sendiri. Hal-hal inilah yang memicu ketegangan yang berkelanjutan, terutama dengan kalangan umat Islam.

c. Masa depan keberagaman di Indonesia.

Mengingat Indonesia ini merupakan negeri yang serba majemuk (*plural*), yaitu majemuk suku, bahasa, adat kebiasaan, tradisi, watak, dan juga agamanya, maka konsep "keindonesiaan" menjadi perlu dipertimbangkan. Agar kesadaran majemuk tersebut dapat terselenggara dengan baik, maka, khusus berkaitan dengan kehidupan beragama, diperlukan sifat "terbuka" dalam arti seseorang membenarkan sungguh-sungguh dan total terhadap keyakinan agama diri sendiri, sekaligus terbuka untuk menghormati orang lain dalam membenarkan keyakinan agamanya sendiri pula. Dengan lain kata, bagimu agamamu, bagiku agamaku.

Dalam perdebatan legislasi dalam SU-MPR 1978 telah terjadi pertarungan antara elite nasionalis sekuler yang membela Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dengan pangkal pikir *politik* *yuridis* dan elite nasionalis Islami yang menolak Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pangkal pikir *normatif teologis*, yang akhirnya dapat dicarikan titik temunya lewat pangkal pikir *faktual-sosiologis* bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu memang ada dan telah ada sejak sebelum merdeka. Pangkal pikir semacam ini baru bisa diendapkan kalau memiliki kecenderungan perlunya mempelajari agama-agama, yaitu disamping pengetahuan tentang agamanya sendiri juga pengetahuan tentang agama lainnya. Karena itu studi agama-agama (*Religionswissenschaft*) menjadi perlu diperhatikan sebagai salah satu pilar pemecahan masalah keagamaan di Indonesia.

Selanjutnya disiplin hukum dalam praktek hidup beragama juga perlu ditegakkan. Sebab negara RI adalah negara hukum. Semua anggota warga negara wajib taat hukum. Sebab rumusan hukum adalah produk wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Disamping itu, hidup beragama juga perlu memperhatikan HAM yang telah disepakati secara internasional. Sebagai warga dunia mau tak mau perlu mempertimbangkan masalah HAM ini. Hanya saja pemberlakuan HAM tersebut harus proporsional. Artinya, tidak semestinya menghormati HAM lalu mengalahkan diktum-diktum hukum produk atau hasil dari kesepakatan anak bangsa sendiri. Tidak benar kalau HAM dijadikan sebagai "alat pemukul" atau "alat berlindung" jika memiliki masalah hukum di dalam negeri. Bercepat-cepat menginternasionalkan kasus-kasus hukum dengan dalih HAM adalah kurang mendidik bagi warga negara yang diinginkan menjadi manusia yang sadar hukum secara lebih anggun dan lebih bermartabat.

C. KESIMPULAN

1. Akar penyebab terjadi ketegangan baik sebelum, di tengah-tengah, dan setelah proses-proses legalisasi konstitusional dalam forum SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978 adalah disebabkan

oleh: (a) imbas kesadaran para elite nasionalis Islami dalam perjuangan ideologi Islam dalam konteks kenegaraan; (b) pangkal pikir yang dipakai berdebat sangat berbeda tajam, yaitu antara pangkal pikir *politis yuridis* dan *normatif teologis*, sehingga sukar dapat dipertemukan; (c) konsideran Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 adalah tetap memberi peluang kalangan umat Islam untuk berjuang dalam forum legislasi konstitusional yang demokratis; dan (d) sejarah berdiri dan eksistensi secara kelembagaan dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tampak belum stabil dan ditambah adanya tuntutan-tuntutan yang mengundang kepekaan kalangan "agama" (terutama umat Islam) seperti tuntutan pernikahan sendiri, KTP sendiri, pemakaman/tata cara kematian sendiri, dan sumpah/janji sendiri.

2. Implikasi legalitas konstitusional yang diperoleh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud aplikasinya adalah bahwa: (a) hasil Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diaplikasikan dalam wujud *pengawasan*, belum penjaminan, mengingat imbas kondisi politik sebelum berlangsungnya SU-MPR 1973. Sementara itu, hasil Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang hal yang sama diaplikasikan dengan mengeluarkan tugas pengawasan dari Departemen Agama RI. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik yang mengarah untuk pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara; salah satu cara memuluskannya adalah dengan cara itu; (b) implikasi lain sebagai kelanjutannya adalah perlunya sikap "terbuka" dalam hidup beragama dengan sosialisasi studi agama-agama (*Religionswissenschaft*) sebagai salah satu pilar pemecahan

masalah; disamping itu penilaian “sesat”, “sempalan”, dan semacamnya yang menyelesaikan adalah pihak internal agama bersangkutan, sedangkan yang ditangani negara adalah hanya masalah pelanggaran hukum yang masuk dalam rumusan hukum positif yang telah disepakati dan memperhatikan HAM secara proporsional; disamping itu di Indonesia masih tetap diperlukan Departemen Agama RI tetapi dengan paradigma baru, yaitu dalam rangka *penjaminan* dan *pelayanan* secara adil dan proporsional, bukan lagi pengawasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
a. Tujuan	9
b. Kegunaan	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	57
G. Sistematika Pembahasan	63
BAB II : KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DARI ASPEK INTERNAL: FORMAT SUBSTANSI DAN INSTITUSI	66
A. Pengertian dan Sejarah	66
B. Sosok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	75
1. Persamaan dengan Agama pada Umumnya dari Aspek Struktur	76
a. Ajaran	77
b. Kultus	80
c. Kumpulan Penghayat	82

2.	Perbedaan Mendasar dengan Agama pada Umumnya dari Aspek Substansi Doktrin	87
3.	Epistemologi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	99
a.	Hakikat Kebenaran	100
b.	Ukuran Kebenaran	102
1)	Kebenaran untuk Menuju "Kesempurnaan"	102
2)	Kebenaran untuk Menuju "Manunggaling Urip"	103
a)	Prinsip Keselarasan	103
b)	Prinsip Kepantasan	105
c.	Cara Pencapaian Kebenaran	106
1)	Lewat Olah Rasa	107
2)	Lewat Olah Pikir	108
a)	Penafsiran dalam Permainan Bahasal	109
b)	Penafsiran dalam Pertunjukan I	113
4.	Wadah Sosial	117
C.	Organisasi	122
1.	Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI)....	124
2.	Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian Kebatinan Kejiwaan Indonesia (BK51).....	126
3.	Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK)	127
4.	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK).....	128
5.	Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (FKPK) dan Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK).....	130

BAB III	: KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DARI ASPEK EKSTERNAL: PERGUMULAN PENENTUAN POSISI DALAM KONTEKS LEGALISASI KONSTITUSIONAL DALAM SU-MPR 1973 DAN SU-MPR 1978.....	132
A.	Prakondisi sampai Menjelang SU-MPR 1973	132
1.	Polemik Tentang "Kebatinan"	133
2.	Polemik Antara Elite Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler	144

a.	Polarisasi Kelompok Elite Indonesia	144
1)	Latar Belakang dan Sebutan	145
2)	Sama dalam Kesadaran Berbangsa Tetapi Beda Orientasi	149
b.	Polemik Tentang Hubungan Antara "Agama" dan "Negara"	152
1)	Masalah Pemisahan Agama di Negara Turki Modern	153
2)	Istilah "Agama"	155
3)	Fungsi "Negara"	158
c.	Fenomena Piagam Jakarta sampai Tahun 1959	162
1)	Persoalan Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa"	162
2)	Piagam Jakarta Tersirat dalam Semangat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...	166
B.	Posisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Islam sampai Tahun 1983.....	171
1.	Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Ideologisasi Islam dalam Konteks Pengerdilan Dasar Negara Pancasila Menjadi Jargon Politik Nasakom	172
2.	Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Ideologisasi Islam dalam Konteks Penegakan dan Pengamalan Kembali Dasar Negara Pancasila	178
a.	Orientasi "Program" Versus Orientasi "Ideologi"	179
b.	Islam Dibenturkan dengan Pancasila	184
C.	Garis Besar Proses Legalisasi Konstitusional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978	192
1.	Prakondisi Khusus Antara 1966-1973	192
2.	GBHN Tahun 1973 dan GBHN Tahun 1978	202
a.	GBHN Tahun 1973	202
b.	GBHN Tahun 1978	209

BAB IV : IMPLIKASI LEGALITAS KONSTITUSIONAL KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA TERHADAP ARAH PROSES PEMBINAANNYA	234
A. Implikasi terhadap Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang Dilakukan Departemen Agama Republik Indonesia	234
1. Kontekstualisasi Fungsi Departemen Agama Republik Indonesia.....	234
2. Perbandingan Pembinaan Departemen Agama terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Antara Tahun 1973-1978 dan 1978-1983	238
a. Periode Kepemimpinan Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A. (1973-1978)	238
b. Periode Kepemimpinan Menteri Agama Letnan Jenderal H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (1978-1983).....	250
c. Perubahan dan Kesenambungan Pembinaan Departemen Agama RI dari Kedua Periode	256
B. Sekilas Tentang Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.....	260
1. Sekitar Pergeseran Lembaga Pembina	260
2. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	261
a. Profil Direktorat dan Keadaan Yang Melingkungi	261
b. Kegiatan Pembinaan Secara Umum	266
1) Inventarisasi dan Dokumentasi.....	266
2) Bimbingan dan Penyuluhan.....	267
3) Komunikasi dengan Masyarakat	267
4) Penyebaran Informasi.....	267
3. Beberapa Hal Tentang Pelaksanaan Pembinaan	268
a. Kesulitan Sebutan.....	268
b. Masalah-masalah Kontroversial	269
C. Masa Depan Keberagamaan di Indonesia.....	272
1. Keberagamaan Secara "Terbuka"	275
2. Keberagamaan Berbasis Penghormatan terhadap Keadilan Hukum	285

a. Keberagamaan Yang Berkesadaran Hukum.....	285
b. Keberagamaan Yang Berkesadaran HAM....	291
BAB V : PENUTUP.....	296
A. Kesimpulan.....	296
B. Saran-saran.....	300
DAFTAR BACAAN.....	301
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	320
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : Drs. Mohammad Damami, M.Ag.
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 1 Agustus 1949
NIP : 150202822
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV-b
Jabatan : Dosen
Alamat Rumah : Warungboto UH IV/942 RT 33/RW 08,
Umbulharjo, Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Nama Ayah : H. Zainuri Ilyas
Nama Ibu : Hj. Sriatun Sarbini
Nama Isteri : Dra. Nur Rohmah, M.Ag.
Nama Anak : 1. Arina Nikma Baroroh
2. Indira Diah Utami

B. *Riwayat Pendidikan*

1. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Rakyat (Kediri, 1962)
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (Kediri, 1962)
 - c. Madrasah Islam Menengah (Kediri, 1966)
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri (Kediri, 1966)
 - e. Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri (Kediri, 1966)
 - f. Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (Kediri, 1968)
 - g. Sekolah Menengah Atas Jurusan Pasti-Alam (Yogyakarta, 1974)
 - h. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (Sarjana Muda/Bachelor of Arts, 1972)

- i. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (Sarjana Lengkap/Doctorandus, 1979)
 - j. Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Karangmalang Yogyakarta (belum selesai, 1987)
 - k. Stratum 2 (S-2) Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (Magister Agama/M.Ag., 1997)
 - l. Stratum 3 (S-3) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta)
2. Pendidikan Non-Formal
(Tidak ada)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1980-sekarang)
2. Dosen tidak tetap antar fakultas UIN Sunan Kalijaga (Fak. Adab, Fak. Dakwah, Fak. Tarbiyah, Fak. Sainsteks, dan Fak. Isoshum)
3. Dosen tidak tetap di Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta (1985-1986)
4. Dosen tidak tetap di Fakultas Dakwah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1986-1994)
5. Dosen tidak tetap di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
6. Dosen tidak tetap di Fakultas Teknik Industri UAD
7. Dosen tidak tetap di Fakultas Psikologi UAD
8. Kepala Bagian Biro Registrasi Pusat IAIN Sunan Kalijaga (1983-1989)
9. Ymt. (Yang Melaksanakan Tugas) Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1991-1993)

10. Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2004-2007)
11. Pembantu Dekan I/Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2004)
12. Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga (antar waktu) periode 2007-2011

D. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. *Pendidikan Agama Islam* (6 jilid). Penerbit PD Nasional, Yogyakarta, 1979.
- b. *Sejarah Islam* (jilid I). Penerbit PD Nasional, Yogyakarta, 1980.
- c. *Babad Muhammad (Sebuah Tinjauan dari Aspek Mitologis)*. Penerbit Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Depdikbud, 1986-1987.
- d. *Aliran Kepercayaan/Kebatinan (Pengantar Tentang Hubungan Kepercayaan Asli dengan Kebatinan)*. Penerbit Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987 (diktat).
- e. *Akar Gerakan Muhammadiyah*. Penerbit Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001.
- f. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Penerbit LESFI, Yogyakarta, 2002.
- g. *Tasawuf Positif*. Penerbit Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001.
- h. *Penelitian IAIN Sunan Kalijaga* (selaku anggota editor).
- i. *Lima Tokoh Agama IAIN Sunan Kalijaga* (selaku anggota editor)

2. Sebagai Kontributor Artikel Buku

- a. *Islam dan Khazanah Budaya Kraton Yogyakarta* (1998).
- b. *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II* (2001).

- c. *Sastra Jawa, Sebuah Tinjauan Umum* (2001).
- d. *Kraton Jogja, The History and Cultural Heritage* (2002).
- e. *Kanjeng Kyai Surya Raja, Kitab Pustaka Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat* (2002).
- f. *Bharata Yudha, Dimensi Religi dan Budaya dalam Serat Bratayuda* (2004).
- g. *"Kanjeng Kyai" Al-Qur'an, Pusaka Kraton Yogyakarta* (2004).
- h. *Akhlaq/Tasawuf* (2005).
- i. *Aspek-aspek Ajaran Islam dalam Manuskrip Kraton* (2006).
- j. *Penyiaran Islam dan Sosial Keagamaan* (2006).
- k. *Islam dan Budaya Lokal dalam Seni Pertunjukan Rakyat* (2006).
- l. *Upacara Daur Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jilid 3* (2007).

3. Makalah

- a. "Tinjauan terhadap Buku Pelajaran PMP" (Yogyakarta, 1982).
- b. "'Prihatin' dalam Wedatama: Pengertian dan Latar Belakang" (Yogyakarta, 1983).
- c. "J.W.M. Bakker S.J. Tentang 'Agama Asli' dan Gerakan Kebatinan" (Yogyakarta, 1984).
- d. "Pemikiran-pemikiran Tentang 'Tradisi' dan 'Modernisasi' di Sekitar Tahun 1935-1945" (Yogyakarta, 1984).
- e. "Macapatan sebagai Alternatif Alat Dakwah" (Yogyakarta, 1985).
- f. "Persepsi Orang Jawa Tentang Guru" (Yogyakarta, 1986).
- g. "Konsepsi Ketuhanan dalam Naskah Serat Kadis" (Yogyakarta, 1987).

- h. "Suluk Tuwu Linglung (Sebuah Tinjauan Awal)" (Yogyakarta, 1989).
- i. "Manunggaling Kawula Gusti Pantheisme dan Monisme dalam Suluk Jawa Karya P.J. Zoetmulder" (1991).
- j. "Agama dan Sistem Nilai Budaya (Suatu Telaah Teoritik-Antropologik)" (Yogyakarta, 1994).
- k. "Aliran Kepercayaan di Indonesia: Telaah dari Sudut Antropologi Agama" (Yogyakarta, 1995).
- l. "Masalah 'Pemikiran Islam' di Indonesia Masa Orde Baru: Format dan Keharusan Peran IAIN di dalamnya" (Yogyakarta, 1995).
- m. "Kebudayaan Jawa dan Perpaduannya dengan Islam" (makalah dalam seminar IKAPI Cabang DIY, 1995).
- n. "Ulama dan Kaitannya dengan Transmisi Budaya di Jawa" (Yogyakarta, 1996).
- o. "Hikmah: Sebuah Metode Pemaknaan Ajaran Agama (Telaah terhadap Pemikiran Keagamaan Hamka) (Yogyakarta, 1996).
- p. "Tasawuf: Suatu Kemungkinan Rekonstruksi" (Yogyakarta, 1996).
- q. "Heterodoksi Paham Tasawuf di Jawa pada Masa Peralihan dari Zaman Pajang ke Zaman Mataram: Suatu Tinjauan Historis" (Yogyakarta, 1998).
- r. "'Surau' dan 'Langgar': Perbandingan dalam Konteks Pembaharuan Pemikiran Keislaman" (1998).
- s. "Primbon dan Mujarrabat: Sebuah Deskripsi" (Yogyakarta, 1999).
- t. "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Filologis dan Kesusastraan" (Yogyakarta, 1999).
- u. "Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Wujud Budaya Spiritual" (1999).

- uu. "Fungsionalisasi Rasionalitas dalam Konteks" (Yogyakarta, 2005).
- vv. "Masa Depan Kepercayaan: 'Dilestarikan atau Ditinggalkan?'" (makalah dalam seminar tentang Kepercayaan Masyarakat, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Depbudpar RI, 2005).
- ww. "Keragaman Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Konteks Perbandingannya dengan Format Substansi Agama pada Umumnya" (makalah dalam Sarasehan Tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Depbudpar RI, 2005).
- xx. "Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" (makalah dalam forum Penataran Tenaga Teknis Pamong Budaya Spiritual, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Depbudpar, 2005).
- yy. "Tasawuf, Keindonesiaan, dan Kuntowijoyo" (2005).
- zz. "Pemanfaatan Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" (makalah dalam forum Kegiatan Pengenalan Nilai-nilai Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kantor Jarahnitra DIY, 2006).
- aaa "Penilaian sesat: Perpektif Studi Agama-agama" (Yogyakarta, 2008).
- bbb "Perayaan Natal di Tengah Masyarakat Santri: Sebuah Ilustrasi Kehidupan Beragama Yang Dilematik" (Yogyakarta, 2008).
- ccc. "Nilai-nilai Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" (makalah dalam forum Dialog Nilai Budaya Spiritual, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Depbudpar RI, 2009).

- ddd. "Pandangan Masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" (makalah dalam forum Dialog Budaya Spiritual, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Depbudpar RI, 2009).
4. Artikel dalam Jurnal
- a. "‘Aku’ dalam Budaya Jawa", dalam Jurnal *Al-Jami'ah* (No. 55, 1994).
 - b. "Pemikiran Keagamaan dalam Dasa Warsa Terakhir (1980-1990) di IAIN Sunan Kalijaga", dalam *Jurnal Penelitian Agama* (No. 13, Th. V, 1996).
 - c. "Makna Agama dalam Masyarakat Jawa di Kotamadya Yogyakarta", dalam *Jurnal Penelitian Agama* (No. 20 Th. 1998).
 - d. "Islam dan Sistem Keagamaan Masyarakat Jawa", dalam *Religi*, jurnal studi agama-agama (No. 2, Vol. II, Th. 2003).
 - e. "Filologi dalam Konteks Metodologi Studi Agama", dalam *Religi*, jurnal studi agama-agama (No. 1, Vol. IV, Th. 2005).
5. Sebagai Kontributor Artikel Majalah
- a. "Sekte dalam Agama: Analisa Latar Belakang dan Struktur", dalam majalah *Wahana* (No. 3, Th. 1996).
 - b. "‘Tasawuf Modern’: Sebuah Rekonstruksi Ulang?", dalam majalah *Tilawah* (Edisi II, Th. 1997).
 - c. "Wali Songo: Integrasi Islam dan Budaya Jawa", dalam Majalah *Gatra*, (No. 5, Th. 2001).
 - d. "Khiththah Perjuangan Dakwah Muhammadiyah dari Aspek Sosial Budaya", dalam *Suara Muhammadiyah* (No. 24, Th. 2004).
 - e. "Islam dalam Konteks Kejawen", dalam majalah *Basis* (No. 07-08, Th. 2001)

6. Laporan Penelitian

- a. "Perubahan Kebudayaan di Jawa Tengah" (Bappeda Jateng-Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1984).
- b. "Pemikiran-pemikiran Tentang 'Tradisi' dan 'Modernisasi' di Sekitar Tahun 1935-1945" (Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1984).
- c. "Macapatan sebagai Alternatif Alat Dakwah" (Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985).
- d. "Babad Muhammad (Sebuah Tinjauan dari Aspek Mitologis)" (Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Depdikbud, 1987).
- e. "Serat Kadis" (Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Depdikbud, 1987).
- f. "Suluk, the Mystical Poetry of Javanese Muslims" (the Toyota Foundation, Japan, 1988).
- g. "Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa Yogyakarta", II (Depdikbud, 1989/1990).
- h. "Perkembangan Berlakunya Hukum Islam di Yogyakarta" (Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1991).
- i. "Pemikiran Keagamaan dalam Dasa Warsa Terakhir (1980-1990) di IAIN Sunan Kalijaga" (Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993).
- j. "Tarekat dan Perubahan Sosial Budaya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta" (Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1994/1995).
- k. "Makna Agama dalam Masyarakat Jawa di Kotamadya Yogyakarta" (Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995/1996).
- l. "'Kauman' di Kotamadya Yogyakarta Masa Kini (Suatu Telaah Tentang Profil Masyarakat Santri Kota)" (Proyek

- Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996/1997).
- m. "Bentuk-bentuk Kesusastraan Pesantren di Jawa (Sebuah Telaah Eksploratif)" (Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Kantor Depdikbud Jawa Tengah, 1997/1998).
- n. "Kedwiaksanaan dalam Pernaskahan Nusantara, Kajian Tipologi" (Proyek Pusat Bahasa, Jakarta, 2008).

Yogyakarta, 1 Februari 2010

Drs. Mohammad Damami, M.Ag
NIM: 90140/S-3

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

